BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah,

Pendidikan merupakan permasalahan yang menarik didiskusikan pada banyak forum, resmi maupun tidak, mulai dari dasar kebijakannya, pelaksanaannya, para pelaksananya, sampai dengan hasil pelaksanaannya. Mereka menganggap masalah pendidikan semakin memprihatinkan, sebagai dampak dari kurang tepatnya kebijakkan pendidikan, kurang profesionalnya penanganan pendidikan, dan kurang kompetennya para pelaksananya, mengakibatkan hasil pendidikan, yang diantaranya, menempatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada posisi yang sangat rendah diantara ratusan negara di dunia.

Sebagian masyarakat tertentu menyoroti merosotnya tingkat budi pekerti lulusan pendidikan dengan sering terjadinya tindakan kekerasan di masyarakat, dan semakin degradasinya sopan santun baik anak-anak sekolah maupun lulusannya. Diantara mereka ada yang menyalahkan hal ini karena tidak adanya mata pelajaran budi pekerti di sekolah pada jaman ini, menurunnya kualitas pendidikan pada umumnya dan khususnya kualitas guru-gurunya.

Pendidikan masih dianggap sebagai inti permasalahan bangsa, pendidikan sering digunakan sebagai komoditi maskot para calon penguasa pemerintahan dari mulai calon walikota, bupati sampai dengan calon presiden pada pemilihan-pemilhan kepala daerah (Pilkada), maupun pemilihan umum (Pemilu) calon presiden atau pemilihan calon legislatif dengan menjanjikan suatu pelayanan yang sudah sering menjadi tuntutan masyarakat yaitu

kesanggupan akan pelayanan pendidikan dan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat terutama masyarakat miskin.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah banyak di bahas. Di tengah dunia internasional, kemampuan siswa dalam bidang studi matematika menurut *TIMSS-Examination Centre, Office of Research and Development, Ministry of National Education* (2000) menduduki urutan ke 34 dengan skor 40,3 di bawah Malaysia (urutan ke 16), Thailand (urutan ke 27), dan Turki (urutan ke 31). Begitu pula pada mata pelajaran IPA, siswa Indonesia hanya menduduki urutan ke 32 (Ditjen PMPTK, 2006). Dari hasil studi yang dilakukan oleh IAEA (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*) di Asia Timur juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor membaca untuk SD adalah sebagai berikut: (1) Hongkong 75,5, (2) Singapura 74,0, (3) Thailand 65,1, (4) Filipina 52,6, dan (5) Indonesia 51,7. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia hanya mampu menguasai 30% materi bacaan. Mereka menemui kesulitan dalam membaca soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Untuk tingkat SLTP, ternyata prestasi belajar mereka juga menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan. *The Third International Mathematics and Science Study* (IAEA, 1999) melaporkan bahwa diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke–32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Di samping itu, setiap tahunnya sekitar tiga juta anak putus sekolah, dan mereka tidak memiliki keterampilan hidup (Balitbang Diknas, 1999).

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut tentu segala sumber daya harus dikerahkan agar berfungsi optimal sesuai dengan posisi dan kapsistas masing-masing. Semua tenaga kependidikan serta siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini hendaknya memiliki komitmen yang sama.

Dalam dasa warsa terakhir berkembang visi dan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan umumnya, dan sekolah khususnya. Apabila pada era sebelumnya sekolah dipandang sebagai bagian dari birokrasi pendidikan, maka sekarang ini sekolah adalah sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Pergeseran paradigma ini berimplikasi luas dalam administrasi dan pengelolaan sekolah.

Paling tidak ada tiga prinsip atau azas yang harus selalu diperhatikan dalam pengelolaan sekolah, yaitu: partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan yang selama ini belum menggembirakan. Partisipasi, menuntut setiap penyelenggara dan pengelola sekolah melibatkan *stakeholder* dalam perumusan berbagai kebijakan. Transparansi mengharuskan sekolah terbuka, terutama dalam pemerolehan dan penggunaan dana, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi tidak akan terjadi tanpa didukung oleh akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap orang tua

dan masyarakat, tidak hanya dalam aspek pengelolaan sumber-sumber daya, namun juga dalam proses pembelajaran dan pelayanan yang mereka berikan. Dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, administrasi dan pengelolaan sekolah semakin menuntut kesungguhannya dalam pemanfaatan partisipasi masyarakat, dengan timbal balik transparansi dan akuntabilitasnya.

Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah *pemerataan, mutu dan relevansi serta efektivitas manajemen pendidikan*. Manajemen pendidikan yang sentralistik yang kita laksanakan selama pemerintahan Orde Baru, dipandang kurang mendorong terjadinya demokratisasi pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistik tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman atau kepentingan baik untuk daerah, sekolah maupun peserta didik, serta mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut di atas telah dilakukan, di antaranya pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan pada prinsip desentralisasi manajemen pendidikan. Salah satu langkah yang dilaksanakan adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep pengelolaan sekolah yang berawal dari kemampuan, inisiatif, dan kreativitas sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya, dan tidak tergantung pada petunjuk dari pemerintah pusat. Semua kegiatan pengambilan keputusan, perencanaan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri dan bukan berasal dari birokrasi diatasnya. Melalui manajemen berbasis sekolah maka

kemandirian sekolah dapat terwujud melalui upaya-upaya maksimal dari guru, kepala sekolah dan partisipasi masyarakat (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Disamping itu untuk mewujudkan pengelolaan sekolah yang baik, perlu adanya kepala sekolah yang memiliki kemampuan sesuai tuntutan tugasnya. Untuk itu didalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan, pasal 38 disebutkan ***kriteria menjadi kepala*** SMP/MTs/ SMA/MA/ SMK/ MAK meliputi:

1) Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK;
2) Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
4) Memiliki kemampuan kepemimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan ***manajemen berbasis sekolah*** ada 3 (tiga) hal yang perlu dilaksanakan yaitu:

1) manajemen sekolah baik fungsi maupun substansinya dalam kerangka MBS;
2) pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM); serta
3) peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, telah diamanatkan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 8 disebutkan "masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan", dan pada pasal 9 berbunyi " masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan".

Masyarakat mau mendukung program sekolah apabila sekolah menyelenggarakan manajemen pendidikan yang transparan, utamanya transparansi dalam manajemen keuangan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka masyarakat berhak mengetahui pendayagunaan apa yang telah disumbangkannya kepada lembaga pendidikan, baik tingkat efektivitas maupun tingkat efisiensinya. Dengan demikian kepala sekolah perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan manajemen berbasis sekolah (*school based managemen*) sebagai prinsip utama yang harus dipegang taguh dalam pengelolaan semua satuan pendidikan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini menyatakan: "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah **menerapkan manajemen berbasis sekolah** yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas."

Untuk menjamin terimplementasikannya manajemen berbasis sekolah, PP nomor 19/2005 tersebut juga menetapkan bahwa proses pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan juga harus sejalan

dengan nafas manajemen berbasis sekolah. Pada intinya pengambilan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terwadahi dalam Dewan Pendidik dan Komite Sekolah.

Terkait dengan Pengambilan Keputusan, beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi bidang-bidang pengambilan keputusan, prosedur pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Sedangkan bidang non-akademik pengambilan keputusan dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala sekolah. Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Rencana kerja yang harus dibuat oleh satuan pendidikan meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Satuan Pendidikan dasar dan Menengah harus harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Beberapa standar pengelolaan yang dikemukakan di atas mengisyaratkan bahwa sejak saat ini sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab yang sangat strategis dan jauh lebih luas di bandingkan masa sebelumnya. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih mampu membangun hubungan kemitraan dengan dan

memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), bersikap lebih terbuka dan akuntabel.

Kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada sekolah tersebut pada gilirannya menuntut setiap sekolah mereformasi dirinya. Setiap sekolah harus beralih dari budaya dan manajemen yang bersifat "menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas" yang bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan hasil evaluasi diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam proses pengembangan sekolah, dan peningkatan mutu sebagai muara dan tujuan utama dari setiap usaha pengembangan itu.

Dalam pengelolaan yang demikian itu, proses perencanaan akan menjadi perangkat yang esensial dalam pengelolaan sekolah. Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang diterapkan pada setiap sekolah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi lima pilar utama yang digariskan dalam standar pengelolaan itu—kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kepala sekolah adalah sosok kunci yang menentukan terwujudnya berbagai standar pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas. Kompetensi kepala sekolah di bidang perencanaan dan pengambilan berbagai keputusan strategis menjadi prasyarat keberhasilan pengembangan sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus mampu membangun kemandirian sekolah melalui penguatan kompetensinya di bidang perencanaan pengembangan sekolah.

Sehubungan tersinyalemen adanya penyimpangan-penyimpangan dari yang seharusnya dan tidak sesuai dengan harapan-harapan publik, masalah pendidikan masih sangat menarik untuk diteliti. Kondisi ini sangat menantang dan seharusnya menjadi panggilan jiwa dari para guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk bersama-sama memikirkan pemecahannya.

Dari sisi kebijakan, pemerintah paling sering dijadikan sebagai pihak yang paling disalahkan sehingga lahir pemeo '*ganti menteri ganti kurikulum*', padahal kalau dipikir lebih seksama penggantian kurikulum berkisar rata-rata sepuluh tahunan, kurikulum 60-an, 75, 84, 94, dan kurikulum 2004 yang membagi kewenangan pembuatan kebijakan pendidikan dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat paling rendah, mulai tingkat nasional (pemerintah pusat) yang berwenang membuat kebijakan pendidikan tentang standar nasional pendidikan sampai dengan tingkat satuan pendidikan (sekolah) yang berwenang membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pihak yang berikutnya setelah pemerintah, sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab sebagai penyebab terjadinya permasalahan pendidikan di negeri ini berdasarkan pendapat masyarakat umum yang muncul di permukaan melalui media cetak maupun elektronik. Padahal pada sisi lain kualifikasi pendidikan dari masa-ke masa terus ditingkatkan sebagai contoh tahun enam-puluhan kualifikasi guru SD cukup lulusan SGB setingkat SMP, tahun tujuh-puluhan ditingkatkan menjadi SPG setingkat SMA, kemudian tahun delapan-puluhan ditingkatkan

menjadi diploma, dan sekarang kualifikasi guru SD atau MI sampai dengan SMA/SMK atau MA/MAK minimal pendidikan S1 (sarjana).

Sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan modal awal terjadinya penyelenggarakan suatu pendidikan formal maupun non formal masih menjadi faktor utama dan beban berat bagi semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan sarana dan prasarana, suatu sekolah bisa dikenal sebagai sekolah yang elit atau sekolah yang kumuh, sekolah elit seperti sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan besar atau pihak-pihak yang memiliki dana berkelebihan, sekolah-sekolah terpadu, sekolah-sekolah sehari penuh (full day school), sekolah-sekolah yang menyediakan pemondokan (boarding school), sekolah-sekolah kumuh seperti sekolah-sekolah di pedesaan, ditengah-tengah wilayah kumuh di pinggiran perkotaan.

Banyak sekolah yang masih dinilai masyarakat sebagai sekolah yang kurang bersih, fasilitasnya tidak lengkap, ruang kelasnya tidak mencukupi sehingga harus dua *shift*, muncul di media masa tentang masalah sarana dan prasarana pendidikan seperti judul berita '*sekolah kandang ayam*', *robohnya bangunan sekolah, sekolah berjualan seragam, guru sekolah berjualan buku*, dan lain-lain .

Pengelolaan pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, seperti halnya pengelolaan-pengelolaan bidang lainnya di negeri ini, implementasinya masih dipertanyakan profesionalitasnya. Banyak yang berpendapat bukan sistem yang salah tetapi komitmen para pelaksana sistem yang masih rendah yang mengakibatkan implementasi pendidikan di negeri kita masih belum berjalan sesuai dengan harapan publik. Implementasi suatu

regulasi di negeri jiran Malaysia, sebagai contoh, dinilai sudah berjalan lebih baik meskipun sistemnya belum sebaik di negeri kita terbukti penilaian independen tentang hasil pendidikannya lebih baik dari kita, Implementasi pendidikan yang tidak seseuai dengan harapan regulasi maupun masyarakat cenderung disebabkan oleh tidak berjalannya secara sistemik sistem pengawasan dan evaluasi.

Pembiayaan, mulai bermasalah sejak dari konstitusinya yang dijabarkan dengan kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan penyesuai-an-penyesuaian dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi. Prioritas alokasi anggaran pendidikan diluar gaji dan anggaran pendidikan kedinasan minimal 20% sukar dilaksanakan eksekutif, meskipun demikian dengan anggaran dana yang jauh dibawah batas minmal sekalipun kebocoran-kebocoran terjadi sangat tinggi, juga lebih diakibatkan oleh tidak berjalannya kegiatan pengawasan dan evaluasi yang baku. Masyarakat kebanyakan merasakan biaya pendidikan yang dibebankan kepadanya sangat berat, disisi lain para pendidik terutama yang belum berstatus PNS, guru yayasan kecil menerima penghasilan dibawah kewajaran.

Penilaian merupakan problema pro kontra di tengah-tengah masyarakat konsumen pendidikan maupun masyarakat pendidik sendiri. Penentuan kelulusan yang didasarkan pada hasil ujian nasional sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 menciptakan banyak ekses negatif seperti lahirnya tim sukses Ujian Nasional dari mulai tingkat sekolah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi demi prestise lembaga atau pengamanan posisi jabatan. Oknum-oknum petugas

yang berdekatan dengan perencanaan, pelaksanaan penggandaan naskah soal memanfaatkan ketegangan orang tua siswa/ masyarakat untuk mengkomersilkan kebocoran naskas soal dengan harapan mendapat keuntungan yang sangat besar.

Masalah pendidikan terindentifikasi sangat komplek dan saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahannya pada perihal kegiatan manajemen sekolah dan kompetensi tenaga kependidikan, yang lebih khusus lagi pada variabel kegiatan manajemen operasional sekolah, supervisi, dan kompetensi guru SMA Negeri di Kota Cimahi. Penelitian ini akan mengkaji kontribusi variabel kegiatan manajemen operational sekolah, supervisi pembelajaran, dan kompetensi guru.

2. Rumusan Masalah,

Berdasarkan pada batasan masalah tersebut, agar permasalahan tidak terlalu melebar sehubungan dengan keterbatasan waktu, anggaran, dan kemampuan melaksanakan penelitian, dirumuskan permasalahan seperti sebagai berikut: ***"Seberapa besar pengaruh manajemen operasional sekolah dan supervisi terhadap kompetensi guru SMA Negeri di Kota Cimahi?"***. Dari rumusan masalah tersebut, penulis merinci bagian permasalahan seperti sebagai berikut:

1) Seberapa besar :

a. Manajemen operasional sekolah di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

b. Supervisi di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

c. kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

2) Bagaimana pengaruh manajemen operasional sekolah terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

3) Bagaimana pengaruh supervisi terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

4) Bagaimana pengaruh manajemen operasional sekolah dan kegiatan supervisi terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

3. Tujuan Penelitian,

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mengetahui gambaran tentang praktek pengelolaan sekolah yang ideal berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada kajian ilmu atau teori administrasi pengelolaan pendidikan dengan kompetensi guru diatas standar yang berlaku, dengan tujuan khususnya untuk mengetahui:

1) gambaran tentang:

a. manajemen operasional sekolah di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

b. implementasi supervisi pembelajaran di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

c. kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi?

2) pengaruh manajemen operasional sekolah terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi,

3) pengaruh supervisi terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi,
4) pengaruh manajemen operasional sekolah dan supervisi terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi.

4. Asumsi

Titik awal dimulainya penelitian ini adalah adanya asumsi sebagai hasil pemikiran sendiri yang juga merupakan landasan perumusan hipotesis. Asumsi ini adalah bahwa ***dengan manajemen operasional sekolah dan supervisi sesuai dengan standar pengelolaan sekolah dan kajian ilmu administrasi pendidikan serta standar kompetensi supervisi kepala sekolah dan kajian ilmu administrasi supervisi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran termotivasi, dan terpantau berkembang sesuai dengan kompetensinya.***

5. Hipotesis

1) Manajemen operasional sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi,
2) Supervisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi,
3) Manajemen operasional sekolah dan supervisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi guru di SMA-SMA Negeri kota Cimahi.

Paradigma Penelitian (Hubungan antar variable) :

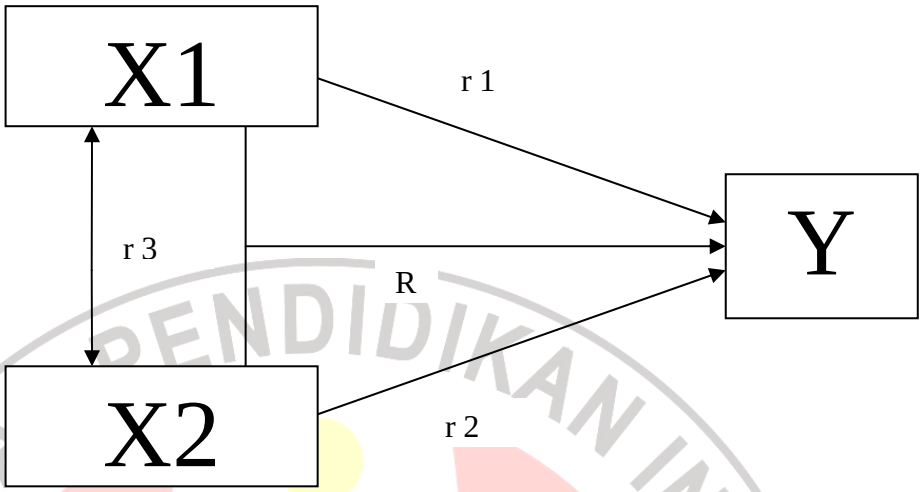

Gambar 1.1 Paradigma penelitian (Hubungan antar variabel)

X1 : Manajemen Operasional Sekolah

X2 : Supervisi

Y : Kompetensi Guru

6. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian ***"kuantitatif"*** pendekatan penelitian dengan tahapan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data hasil penelitian dengan menggunakan cara ilmiah analisa statistic.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian ***"deskriptif"*** yang didukung oleh kajian kepustakaan, perolehan informasi atau data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui penelaahan berbagai konsep atau teori pemikiran yang dikemukakan para akhli. Metode penelitian

deskriptif ini berupaya untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi.

Instrumen penelitian terdiri atas instrumen variabel implementasi manajemen operational sekolah, supervise pembelajaran, kompetensi guru. Setiap variabel dibagi kedalam indikator-indikator dengan teknik pengumpulan data, menggunakan alat ukur penelitian berbentuk angket, dengan tingkat pengukuran ordinal, kategori jawaban tediri atas 5 tingkatan, alternatif jawaban diberi skor nilai 1 s.d. 5.

Teknik analisis data mengunakan analisis pengolahan data secara kuantitatif. Diawali dengan uji normalitas data dengan membandingkan harga ***chi-kuadrat*** hitung dengan ***chi-kuadrat*** tabel. Kemudian menggunakan teknik korelasi ***Pearson Product Moment,*** pertama dan kedua dengan korelasi sederhana dan ketiga dengan korelasi ganda.

7. Lokasi dan Sampel Penelitian

Populasi untuk penelitian ini adalah atas guru Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Cimahi propinsi Jawa Barat sebanyak 436 orang dengan jumlah sampel dari populasi dengan taraf kesalahan 5% menurut Tabel 5.1. Sugiyono (2003:99) sebanyak 195 orang,